

XIV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah

a) Dasar Hukum

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ;
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

b) Domisili

Domisili Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan Raya Bandara Juanda No. 22 Sidoarjo, Jawa Timur.

c) Geografi

Batas wilayah Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur :

- Sebelah Utara Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo
- Sebelah Selatan lahan persawahan milik perorangan
- Sebelah Barat Hotel Sofia Sidoarjo
- Sebelah Timur Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.

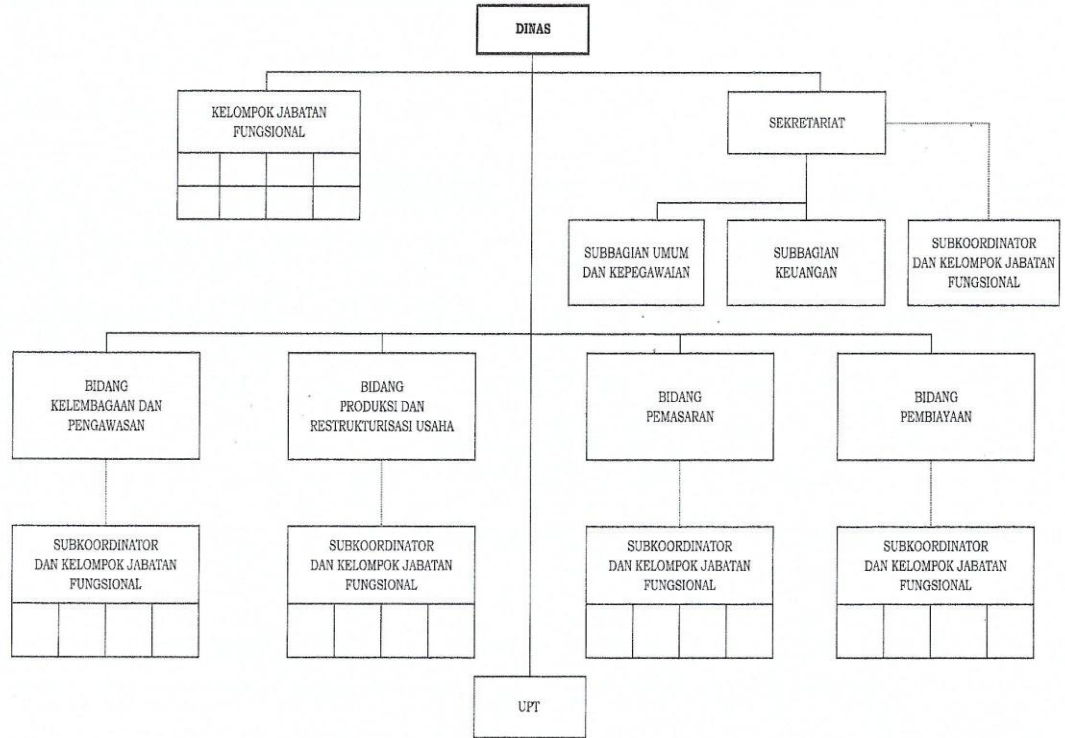
d) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - (2) Sub Bagian Keuangan ;
 - (3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pemasaran, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pembiayaan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, membawahi :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - (3) Seksi Pengembangan Pelatihan.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 91 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDR PARAWANSA

e) Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f) Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Visi " Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja sama dan semangat gotong royong "

Misi :

- (1) Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah ;
- (2) Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan ;
- (3) Pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan ;

- (4) Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah ;
- (5) Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris ;
- (6) Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan ;
- (7) Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang terbuka.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mendukung Misi 1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur :

TUJUAN	: Meningkatkan PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur
INDIKATOR TUJUAN	: Pertumbuhan PDRB K-UMKM Jawa Timur
SASARAN	: Meningkatkan nilai tambah bruto K-UKM binaan
INDIKATOR SASARAN	: Nilai tambah bruto K-UKM binaan (IKU)

Nawa Bhakti Satya :

1. Jatim Sejahtera (mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial) ;
2. Jatim Kerja (meperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi) ;
3. Jatim Cerdas dan Sehat (pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas) ;
4. Jatim Akses (membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar) ;

5. Jatim Berkah (membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur, dan berintegritas) ;
6. Jatim Agro (memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan) ;
7. Jatim Berdaya (memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDES, dan mendorong terciptanya desa mandiri) ;
8. Jatim Amanah (menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan anti korupsi) ;
9. Jatim Harmoni (mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olahraga)

2. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam penyajian Laporan Keuangan dibuat secara lengkap, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu saja ataupun manajemen entitas pelaporan, namun juga berisi informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal, entitas pelaporan serta pencapaiannya dan memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan tupoksi dinas.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifikasi tidak hanya bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Sedangkan tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan dan secara spesifik Laporan Keuangan disajikan bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 ;
- 2) Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286) ;
- 3) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

- 5) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

- 15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- 16) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 ;
- 17) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 beserta Perubahannya ;
- 18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ;
- 19) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- 20) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1) Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan, Kebijakan Keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

3) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4) Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

5) Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yaitu Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Serta pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

6) Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

7) Penutup

B. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

1. Ekonomi Makro

Persaingan usaha dalam era globalisasi merupakan faktor utama yang saat ini sangat mempengaruhi terhadap dunia usaha disamping adanya dampak krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan beberapa tahun lalu, sehingga menjadi perhatian bagi semua pelaku ekonomi, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi di dalam manajemen/mengelola usahanya agar dapat tetap eksis dan berkembang maju.

Sebagai Provinsi yang besar, Jawa Timur menyimpan berbagai macam potensi yang cukup besar, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dengan demikian perlu untuk diantisipasi terhadap perkembangan perekonomian Jawa Timur.

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian Jawa Timur, salah satunya dengan pengembangan pelaku dan usaha KUMKM menjadi prioritas nasional sebagaimana hasil National Summit, serta dampak pandemi Covid-19 serta krisis financial global juga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah (pusat dan daerah) perlu mengoptimalkan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat skala Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) memiliki peran besar dalam perekonomian rakyat di Jawa Timur. Sedangkan keberadaan Koperasi UKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat, dan menyerap banyak tenaga kerja, meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang realtif lebih kecil dari pada Usaha berskala besar.

Seiring dengan hal tersebut maka perlu kiranya upaya untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM di Jawa Timur dengan melalui program-program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksinya serta mengacu RPJMD dan secara riil dijabarkan dalam RKPD yang ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja Dinas maka program-program Dinas diupayakan untuk peningkatan Perekonomian masyarakat salah satunya dengan program Peningkatan Program Ekonomi Makro melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendidikan Kemasyarakatan melalui bimbingan teknis Manajemen dan Kewirausahaan.

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan dibidang penerimaan/pendapatan daerah (*revenue policy*) dan kebijakan dibidang pembelanjaan keuangan daerah (*expenditure policy*) dan masing-masing mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat sinergi. Idealnya expenditure adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dan sebaliknya revenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi penerimaan.

Kebijakan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Kebijakan Keuangan Provinsi Jawa Timur yaitu ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum yaitu Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan KUMKM di Jawa Timur menghadapi permasalahan KUMKM yang terkendala :

- a) Rendahnya produktivitas;
- b) Terbatasnya akses sumber daya produktif;
- c) Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi;
- d) Rendahnya kinerja Koperasi dan
- e) Kurangnya konduksif iklim usaha,

C. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Indikator/Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2022 capaian terhadap target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen perencanaan perangkat daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen RKA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen RKA Perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen DPA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen DPA Perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen capaian kinerja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen evaluasi yang disusun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan pembayaran gaji dan tunjangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan Dokumen Keuangan SKPD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan verifikasi penatausahaan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran
1	2	3	4
		Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	12 laporan akuntansi perangkat daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	2 laporan Keuangan SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen tanggapan atas LHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan keuangan yang disusun
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan prognosis
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 laporan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleng-kapannya	1 paket pengadaan pakaian dinas
		Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepega-waian	12 laporan pengo-lahan administrasi kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan data pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket pengadaan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket pengadaan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket pengadaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket pengadaan
		Penyediaan Bahan/Material	1 paket pengadaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket pengadaan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran
1	2	3	4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket pengiriman dokumen
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket jasa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 paket jasa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	1 paket jasa
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 paket jasa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 paket Gedung yang dipelihara Jumlah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket

Program 1	Kegiatan 2	Sub Kegiatan 3	Output/Sasaran 4
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150 unit izin usaha simpan pinjam Koperasi yang difasilitasi
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	300 unit Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi yang difasilitasi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	250 unit Koperasi yang dilakukan Pengawasan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	125 unit Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2 modul yang dihasilkan/diupdate, 150 orang SDM Koperasi peserta pelatihan, 410 orang SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya (DAK Non Fisik)
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	360 orang SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya

Program 1	Kegiatan 2	Sub Kegiatan 3	Output/Sasaran 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 unit koperasi yang terakses informasi pasar, 350 unit koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, 758 unit KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya, 303 unit koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	386 unit koperasi yang dikuatkan organisasinya, 410 koperasi yang terakses informasi perkoperasian, 75 unit Koperasi yang difasilitasi promosi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengan tasan Kemiskinan	270 unit UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM, 1050 unit UKM yang difasilitasi pengembangan usaha, 480 unit UKM yang dikuatkan akses pembiayaannya, 175 unit UKM yang difasilitasi akses promosi, 120 unit UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya, 390 unit UKM yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran
1	2	3	4
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	300 Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan, 200 Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan, 250 Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran 598 Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya

2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
BELANJA DAERAH	116.457.800.479,00	99.933.510.284,00	85,81	(16.524.290.195,00)	(14,19)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.274.800.535,00	35.619.426.586,00	95,56	(1.655.373.949,00)	(4,44)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.845.415.000,00	1.730.858.818,00	93,79	(114.556.182,00)	(6,21)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	710.817.022,00	701.235.899,00	98,65	(9.581.123,00)	(1,35)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.413.442,00	7.032.545,00	94,86	(380.897,00)	(5,14)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.413.442,00	7.179.045,00	96,84	(234.397,00)	(3,16)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.063.442,00	2.928.045,00	72,06	(1.135.397,00)	(27,94)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.063.442,00	3.881.445,00	95,52	(181.997,00)	(4,48)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.081.325.210,00	990.611.394,00	91,61	(90.713.816,00)	(8,39)
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.319.000,00	17.990.445,00	59,34	(12.328.555,00)	(40,66)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.966.061.000,00	22.716.100.078,00	94,78	(1.249.960.922,00)	(5,22)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.667.789.000,00	21.461.091.918,00	94,68	(1.206.697.082,00)	(5,32)
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	533.969.000,00	533.969.000,00	100,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	683.562.268,00	656.420.055,00	96,03	(27.142.213,00)	(3,97)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.109.478,00	6.876.540,00	75,49	(2.232.938,00)	(24,51)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.222.223,00	4.462.850,00	54,28	(3.759.373,00)	(45,72)
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	44.327.145,00	38.921.780,00	87,81	(5.405.365,00)	(12,19)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18.401.847,00	13.715.500,00	74,53	(4.686.347,00)	(25,47)
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	680.039,00	642.435,00	94,47	(37.604,00)	(5,53)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.024.416.408,00	2.012.385.900,00	99,41	(12.030.508,00)	(0,59)
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	120.428.058,00	118.865.751,00	98,70	(1.562.307,00)	(1,30)
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	244.991.750,00	242.552.565,00	99,00	(2.439.185,00)	(1,00)
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	970.501.600,00	967.899.991,00	99,73	(2.601.609,00)	(0,27)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	350.010.000,00	349.839.050,00	99,95	(170.950,00)	(0,05)
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	338.485.000,00	333.228.543,00	98,45	(5.256.457,00)	(1,55)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.365.674.805,00	3.272.910.915,00	97,24	(92.763.890,00)	(2,76)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	18.053.655,00	17.367.924,00	96,20	(685.731,00)	(3,80)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	716.304.490,00	680.132.832,00	94,95	(36.171.658,00)	(5,05)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	415.693.198,00	402.044.025,00	96,72	(13.649.173,00)	(3,28)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.651.862,00	247.942.420,00	98,82	(2.709.442,00)	(1,08)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.899.600,00	16.980.000,00	85,33	(2.919.600,00)	(14,67)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	56.941.500,00	56.251.594,00	98,79	(689.906,00)	(1,21)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	235.662.500,00	218.351.900,00	92,65	(17.310.600,00)	(7,35)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.652.468.000,00	1.633.840.220,00	98,87	(18.627.780,00)	(1,13)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.650.000,00	274.553.632,00	97,14	(8.096.368,00)	(2,86)
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	282.650.000,00	274.553.632,00	97,14	(8.096.368,00)	(2,86)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.856.000.736,00	3.720.515.621,00	96,49	(135.485.115,00)	(3,51)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	974.433.474,00	946.000.461,00	97,08	(28.433.013,00)	(2,92)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.001.000,00	109.116.394,00	99,20	(884.606,00)	(0,80)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.766.566.262,00	2.660.398.766,00	96,16	(106.167.496,00)	(3,84)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.934.582.586,00	1.892.101.622,00	97,80	(42.480.964,00)	(2,20)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.160.000,00	257.433.737,00	98,57	(3.726.263,00)	(1,43)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.315.486,00	250.222.903,00	98,39	(4.092.583,00)	(1,61)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.427.000,00	201.253.740,00	98,93	(2.173.260,00)	(1,07)
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	970.847.000,00	942.745.263,00	97,11	(28.101.737,00)	(2,89)
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.833.100,00	240.445.979,00	98,21	(4.387.121,00)	(1,79)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.200.000.000,00	1.155.038.406,00	96,25	(44.961.594,00)	(3,75)
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000.000,00	567.454.676,00	94,58	(32.545.324,00)	(5,42)
Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000.000,00	567.454.676,00	94,58	(32.545.324,00)	(5,42)
Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000.000,00	587.583.730,00	97,93	(12.416.270,00)	(2,07)
Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000.000,00	587.583.730,00	97,93	(12.416.270,00)	(2,07)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.494.448.217,00	1.474.306.028,00	98,65	(20.142.189,00)	(1,35)
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.494.448.217,00	1.474.306.028,00	98,65	(20.142.189,00)	(1,35)
Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	1.494.448.217,00	1.474.306.028,00	98,65	(20.142.189,00)	(1,35)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	699.726.550,00	692.330.788,00	98,94	(7.395.762,00)	(1,06)
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	699.726.550,00	692.330.788,00	98,94	(7.395.762,00)	(1,06)
Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	699.726.550,00	692.330.788,00	98,94	(7.395.762,00)	(1,06)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4.280.647.124,00	4.257.783.308,00	99,47	(22.863.816,00)	(0,53)
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.948.201.282,00	2.936.254.212,00	99,59	(11.947.070,00)	(0,41)
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.948.201.282,00	2.936.254.212,00	99,59	(11.947.070,00)	(0,41)
Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.332.445.842,00	1.321.529.096,00	99,18	(10.916.746,00)	(0,82)
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.332.445.842,00	1.321.529.096,00	99,18	(10.916.746,00)	(0,82)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	15.180.847.157,00	14.222.690.135,00	93,69	(958.157.022,00)	(6,31)
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.180.847.157,00	14.222.690.135,00	93,69	(958.157.022,00)	(6,31)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	9.187.143.314,00	8.570.517.085,00	93,29	(616.626.229,00)	(6,71)
Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5.993.703.843,00	5.652.173.050,00	94,30	(341.530.793,00)	(5,70)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	46.517.750.877,00	33.321.314.930,00	71,63	(13.196.435.947,00)	(28,37)
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	46.517.750.877,00	33.321.314.930,00	71,63	(13.196.435.947,00)	(28,37)
Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	46.517.750.877,00	33.321.314.930,00	71,63	(13.196.435.947,00)	(28,37)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.809.580.019,00	9.190.620.103,00	93,69	(618.959.916,00)	(6,31)
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	9.809.580.019,00	9.190.620.103,00	93,69	(618.959.916,00)	(6,31)
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	9.809.580.019,00	9.190.620.103,00	93,69	(618.959.916,00)	(6,31)
Jumlah Belanja Daerah	116.457.800.479,00	99.933.510.284,00	85,81	(16.524.290.195,00)	(14,19)

3. Hambatan dan Kendala

Upaya untuk mencapai target penerimaan asli daerah (PAD) TA. 2022 sangat dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak stabil yang berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

- 1) Penurunan penerimaan dari pengelolaan dana bergulir karena adanya kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19 terkait pemberian stimulus dan kelonggaran perpajakan ;
- 2) Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB/PPKM) ;
- 3) Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19.

Sedang hambatan dan kendala dalam pencapaian realisasi belanja daerah TA. 2022 sebagai berikut :

- 1) Adanya kebijakan terkait pembatasan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah ;
- 2) Pengurangan jumlah kegiatan yang bersifat tatap muka sebagai dampak dari pandemi covid-19 ;
- 3) Adanya efisiensi operasional kantor menyebabkan menurunnya belanja operasional SKPD.

Dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam TA. 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tetap melaksanakannya program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan Renstra tahun 2019–2024 yang merupakan program yang berkelanjutan.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Sistem akuntansi pemerintahan ada 2 (dua) entitas penyelenggara yaitu **entitas pelaporan dan entitas akuntansi sebagai berikut :**

a. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut undang-undang wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

b. **Entitas Akuntansi** adalah Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian dari Entitas Akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan Keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan seluruh bidang-bidang teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 6 Bidang yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Kelembagaan
- 3) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
- 4) Bidang Pembiayaan
- 5) Bidang Pemasaran
- 6) UPT Pelatihan Koperasi dan UKM

Sebagai entitas pelaporan maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur menyusun laporan sebagai berikut:

(1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri dari pendapatan dan belanja disusun dengan menggunakan Sistem akuntansi berbasis Kas.

Angka realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Tahun 2022 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang pembayaran langsung dibayar ke Kas Daerah melalui Bank Jatim, sedangkan untuk retribusi disetor langsung oleh Bendahara Penerimaan.

Angka realisasi Belanja yang disajikan pada laporan Realisasi TA. 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dimana pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang dibelanjakannya.

(2) Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat Keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Neraca

Neraca adalah Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu, sedangkan unsur yang tercakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan entitas dana terutama kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Neraca Dinas disusun berdasarkan kompilasi Neraca, terutama data kas lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(4) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

(5) Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian keuangan secara wajar.

(6) Lampiran Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan APBD.

Laporan kinerja Keuangan APBD merupakan lampiran dari laporan pokok diatas yang menggambarkan Kinerja Keuangan APBD dan Kinerja Keuangan APBD dapat kita informasikan dalam 2 (dua) hal yaitu :

- a. Laporan Kinerja yang berdimensi Keuangan, merupakan informasi yang menggambarkan tingkat penyerapan, perkembangan realisasi;

- b. Laporan Kinerja Keuangan yang terkait dengan program/kegiatan guna mengukur tingkat keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timuryang telah ditargetkan dalam RKPD tahunan atas pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

a) Pengakuan Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA menganut basis kas, sehingga pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah/rekening bendahara penerimaan/rekening bendahara penerimaan pembantu SKPD pelaksana PPK BLUD

b) Pengakuan Pendapatan - LO

Pendapatan - LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned)
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable)

c) Pengakuan Belanja

- 1) Belanja pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah ketika diterbitkan SP2D LS
- 2) Belanja barang jasa diakui pada saat diterbitkan SP2D LS dan terdapat aliran kas keluar oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
- 3) Belanja modal diakui pada saat SP2D LS diterbitkan atau pada saat aliran kas keluar oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

d) Pengakuan Beban

1) Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk membayar gaji maupun tunjangan kepada pegawai

2) Beban barang dan jasa

- Beban bahan, diakui pada saat dikonsumsi/digunakan
- Beban jasa, diakui pada diperolehnya manfaat atas jasa yang diberikan dari pihak ketiga
- Beban Premi Asuransi, diakui pada saat telah memperoleh manfaat perlindungan oleh penyedia jasa asuransi, Beban premi asuransi diakui setiap akhir bulan.
- Beban Perawatan dan Pemeliharaan, diakui pada saat munculnya kewajiban atau pada saat penggunaan atas persediaan
- Beban Cetak dan Penggandaan, diakui pada saat munculnya kewajiban.
- Beban Sewa, diakui pada saat telah memperoleh manfaat atas sewa, beban sewa diakui setiap akhir bulan untuk masa periode bulanan.
- Beban Makanan Minuman, diakui pada saat terjadinya konsumsi Makanan Minuman.
- Beban Pakaian diakui pada saat terjadinya pemakaian/penggunaan.
- Beban Perjalanan Dinas diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA atas perjalanan dinas.
- Beban Pelatihan dan pendidikan, diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA atas biaya pelatihan maupun pendidikan.

e) Pengakuan dan Penghentian Aset Berwujud dan Tidak Berwujud

f) Kontrak-kontrak Konstruksi

g) Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran

h) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

i) Biaya Penelitian dan Pengembangan

j) Persediaan, baik yang dijual maupun untuk dipakai sendiri

3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 pada umumnya menggunakan nilai perolehan historis. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui.

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 tahun 2010. Dengan demikian dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan Terdiri dari :

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima sedangkan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat neto. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah, sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD).

Pengeluaran Kas atas pencairan SP2D Gaji diakui sebagai penambah belanja gaji pada saat dilakukan pertanggungjawaban atas pembayaran gaji pada tahun berjalan, jika terdapat kelebihan gaji yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja gaji. Pengembalian atas belanja gaji pada periode sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Belanja Modal Tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Belanja modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya angkut, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan dll) .

Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (start-up cost) dan para produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerja. Contoh biaya permulaan atau para produksi yang tidak termasuk dalam katagori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan akan kedepan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas atau oleh Masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklarifikasi menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor disajikan sebagai Kas di bendahara Penerimaan. Bunga dan Jasa Giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo Uang Persediaan (UP) yang belum disetorkan ke Kas BUD sampai dengan tanggal pelaporan

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos piutang adalah tagihan Penjualan Rumah (angsuran), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas jam) setelah tanggal laporan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dicatat pada neraca berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- harga wajar atau estimasi nilai penjualan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas atau dimanfaatkan masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya adalah aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur selain aset lancar, investasi dan aset tetap yaitu tagihan Penjualan Angsuran Rumah, tagihan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset Tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak berwujud meliputi : Software Komputer, Lesensi dan Franchise, Hak Cipta (*copyright*), Paten, Goodwill dan hal lainnya. Hak Jasa dan Operasi.

(4) Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan perlakuan kebijakan keuangannya berbasis akrual. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar/ jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah merupakan kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Salah satu timbulnya kewajiban jangka panjang apabila terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali terhadap utang–utangnya yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

(6) Pelaporan

Pelaporan adalah merupakan salah satu serangkaian prosedur sistem akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca
- d. Ekuitas dan;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
 - a. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :

Penerapan Kebijakan Akuntansi Pendapatan yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah.

Penerapan Kebijakan akuntansi Belanja yaitu Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang.

Terkait dengan Kebijakan akuntansi atas belanja modal yaitu dengan mengakui belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi penambahan aset dan memindahkannya ke Konstruksi dalam pengerjaan.

b. Kebijakan akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan metode penyusutan sehingga pelaporan aset untuk periode yang berakhir tahun 2022 disajikan sebesar harga perolehannya dan telah dikurangi dengan penyusutan

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan ikhtisar Sumber Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonvensi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

(1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan target pendapatan sebesar **Rp440.000.000,00** terdapat realisasi pendapatan sebesar **Rp494.522.187,25** atau sebesar **112,39%**. Pendapatan terdiri dari

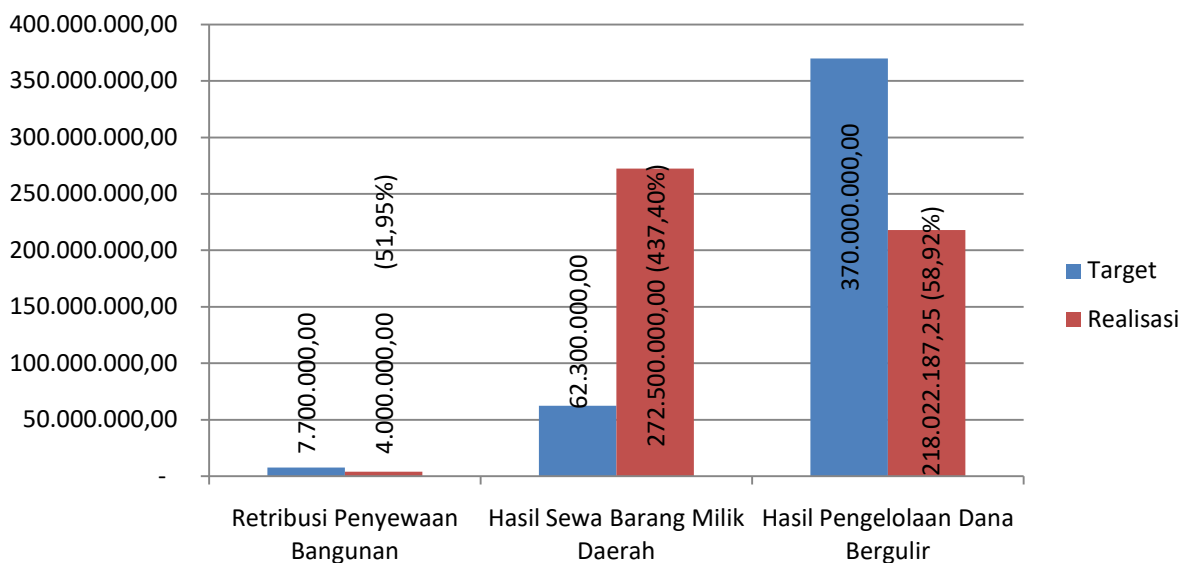
(i) Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar **Rp4.000.000,00**

(i) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar **Rp218.022.187,25**

(ii) Hasil Sewa BMD sebesar **Rp272.500.000,00** Realisasi Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana berikut :

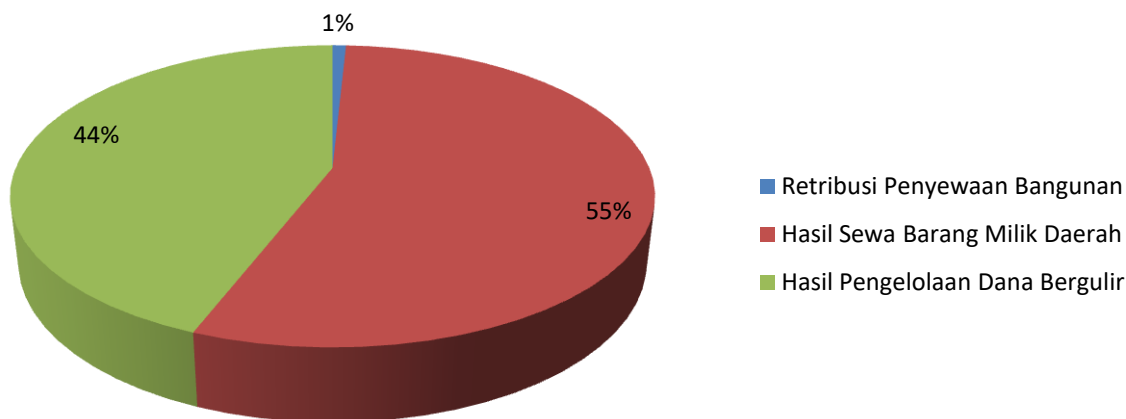
Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah / Berkurang	
		Rp.	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5=(3-2)	6
RETRIBUSI DAERAH	7.700.000,00	4.000.000,00	51,95	(3.700.000,00)	(48,05)
Retribusi Penyewaan Bangunan	7.700.000,00	4.000.000,00	51,95	(3.700.000,00)	(48,05)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAH YANG SAH	432.300.000,00	490.522.187,25	113,47	58.222.187,25	13,47
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	370.000.000,00	218.022.187,25	58,92	151.977.812,75	(41,08)
Hasil Sewa BMD	62.300.000,00	272.500.000,00	437,40	210.200.000,00	237,40
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	440.000.000,00	494.522.187,25	112,39	54.522.187,25	12,39

Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Gambar 1.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan asli Daerah yang dihasilkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar **Rp490.522.187,25** sebagai berikut :

Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 berasal dari Retribusi Daerah dari hasil Retribusi Penyewaan Bangunan yaitu dari sewa penggunaan gedung kantor, sewa penggunaan lapangan olah raga dan kantin terdapat realisasi sebesar **Rp4.000.000,00** atau **51,95 %** dari target yang direncanakan sebesar **Rp7.700.000,00**, bila dibanding dengan realisasi tahun 2021 sebesar **Rp0,00** terdapat kenaikan dikarenakan selama penerapan PPKM saat pandemi Covid-19 tidak ada yang menyewa.

Uraian	Tahun Anggaran 2022		Tahun Anggaran 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
Retribusi Penyewaan Bangunan	7.700.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Jumlah	7.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Lain-lain Penerimaan yang sah

Realisasi lain-lain Penerimaan yang sah Tahun 2022 sebesar **Rp490.522.187,25** dari target pendapatan sebesar **Rp432.300.000,00** atau mencapai **113,47%**, bila dibanding dengan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp305.871.244,98** dari target pendapatan sebesar **Rp347.300.000,00** atau mencapai **88,07 %**. Kenaikan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2022 disumbang dari hasil sewa BMD sebagian gedung UPT Pelatihan Koperasi dan UKM di Malang yang disewa oleh PT. Shopee Internasional Indonesia dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2022		Tahun Anggaran 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
Hasil Sewa BMD	62.300.000,00	272.500.000,00	22.300.000,00	20.500.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	370.000.000,00	218.022.187,25	325.000.000,00	279.086.244,98
Jumlah	440.000.000,00	490.522.187,25	347.300.000,00	305.871.244,98

(2) Belanja

Realisasi Belanja Daerah pada TA. 2022 sebesar **Rp99.933.510.284,00** apabila Realisasi Belanja dihadapkan pada target belanja daerah Sebesar **Rp116.457.800.479,00** terdapat penghematan sebesar **Rp16.524.290.195,00** atau terealisasi **85,81 %** terdapat penghematan sebesar **14,19 %**.

Realisasi Belanja Daerah terdiri dari :

(i) Belanja Operasi sebesar **Rp97.579.275.143,00** terdiri dari :

- (1) Belanja Pegawai **Rp21.995.060.918,00**
- (2) Belanja Barang dan Jasa **Rp50.435.312.255,00**
- (3) Belanja Subsidi **Rp98.749.370,00**
- (4) Belanja Hibah **Rp11.289.152.600,00**
- (5) Belanja Bantuan Sosial **Rp13.761.000.000,00**

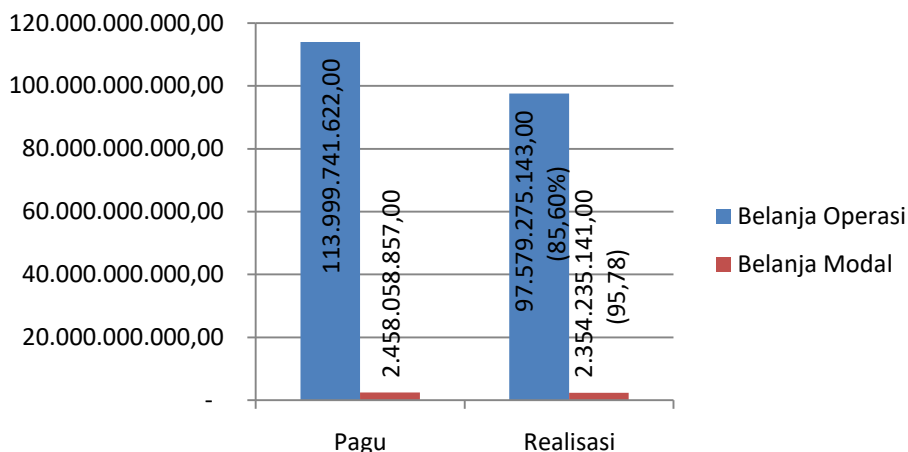
(ii) Belanja Modal sebesar **Rp2.354.235.141,00** terdiri dari :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp2.292.480.585,00**
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp61.754.556,00**

sedangkan iktisar rincian tahun 2022 sebagai berikut :

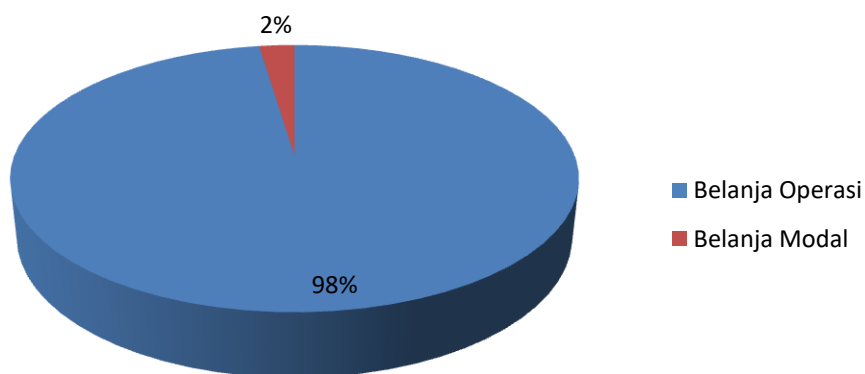
Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
BELANJA DAERAH	116.457.800.479	99.933.510.284	85,81	(16.524.290.195)	(14,19)
BELANJA OPERASI	113.999.741.622	97.579.275.143	85,60	(16.420.466.479)	(14,40)
Belanja Pegawai	23.201.758.000	21.995.060.918	94,80	(1.206.697.082)	(5,20)
Belanja Barang dan Jasa	52.768.445.622	50.435.312.255	95,58	(2.333.133.367)	(4,42)
Belanja Subsidi	7.000.000.000	98.749.370	1,41	(6.901.250.630)	(98,59)
Belanja Hibah	13.030.738.000	11.289.152.600	86,63	(1.41.585.400)	(13,37)
Belanja Bantuan Sosial	17.998.800.000	13.761.000.000	76,46	(4.237.800.000)	(23,54)
BELANJA MODAL	2.458.058.857	2.254.235.141	95,78	(103.823.716)	(4,22)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.396.258.857	2.292.480.585	95,67	(103.778.272)	(4,33)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.800.000	61.754.556	99,93	(45.444)	(0,07)
JUMLAH BELANJA DAERAH	116.457.800.479	99.933.510.284	85,81	(16.524.290.195)	(14,19)

Realisasi Belanja Daerah



Gambar 2.1 Realisasi Belanja Daerah

Komposisi Realisasi Belanja Daerah



Gambar 2.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah

Perbandingan realisasi belanja daerah TA. 2022 sejumlah **Rp99.933.510.284,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp73.836.514.889,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	BELANJA DAERAH	99.933.510.284,00	73.836.514.889,00
Jumlah Belanja Daerah		99.933.510.284,00	73.836.514.889,00

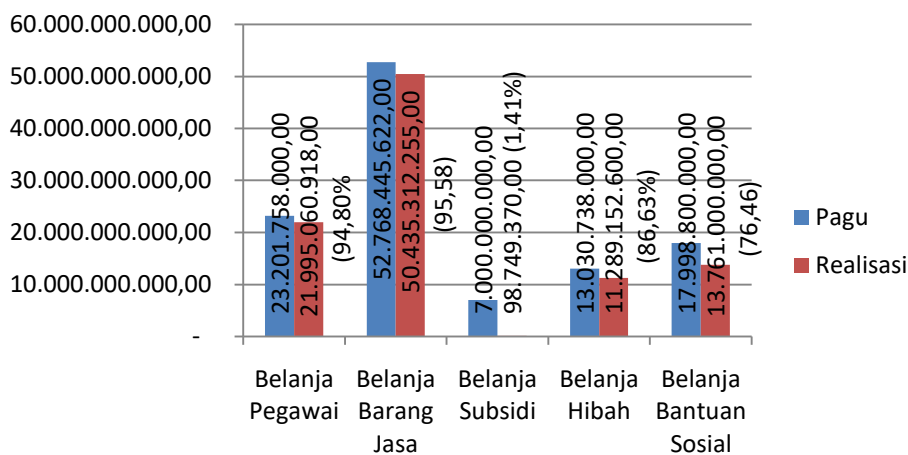
Belanja Operasional

APBD setelah Perubahan atas Belanja Operasional TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp113.999.741.622,00** terealisasi **Rp97.579.275.143,00** atau sebesar **85,60%** dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Operasional sebagai berikut :

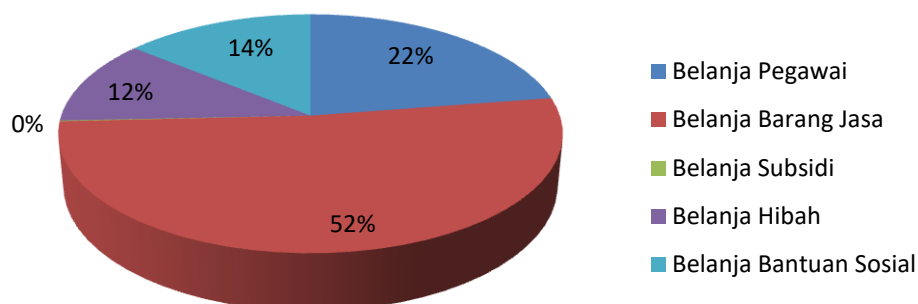
Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
BELANJA OPERASI	113.999.741.622	97.579.275.143	85,60	(16.420.466.479)	(14,40)
Belanja Pegawai	23.201.758.000	21.995.060.918	94,80	(1.206.697.082)	(5,20)
Belanja Barang dan Jasa	52.768.445.622	50.435.312.255	95,58	(2.333.133.367)	(4,42)
Belanja Subsidi	7.000.000.000	98.749.370	1,41	(6.901.250.630)	(98,59)
Belanja Hibah	13.030.738.000	11.289.152.600	86,63	(1.41.585.400)	(13,37)
Belanja Bantuan Sosial	17.998.800.000	13.761.000.000	76,46	(4.237.800.000)	(23,54)
JUMLAH BELANJA OPERASI	113.999.741.622	97.579.275.143	85,60	(16.420.466.479)	(14,40)

Realisasi Belanja Operasi



Gambar 2.3 Realisasi Belanja Operasi

Komposisi Realisasi Belanja Operasi



Gambar 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Operasi

Perbandingan realisasi belanja operasi TA.2022 sejumlah **Rp97.579.275.143,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp71.567.085.629,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	21.995.060.918,00	20.897.561.640,00
2	Belanja Barang dan Jasa	50.435.312.255,00	39.841.086.289,00
3	Belanja Subsidi	98.749.370,00	0,00
4	Belanja Hibah	11.289.152.600,00	10.828.437.700,00
5	Belanja Bantuan Sosial	13.761.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		97.579.275.143,00	71.567.085.629,00

Belanja Pegawai

APBD setelah Perubahan atas Belanja Pegawai TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp23.201.758.000,00** terealisasi **Rp21.995.060.918,00** atau sebesar **94,80%** dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Pegawai	23.201.758.000,00	21.995.060.918,00	94,80	(1.206.697.082,00)	(5,20)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.103.145.000,00	6.799.214.565,00	95,72	(303.930.435,00)	(4,28)
Belanja Gaji Pokok ASN	4.985.000.000,00	4.835.432.580,00	97,00	(149.567.420,00)	(3,00)
Belanja Gaji Pokok PNS	4.985.000.000,00	4.835.432.580,00	97,00	(149.567.420,00)	(3,00)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	486.000.000,00	470.688.942,00	96,85	(15.311.058,00)	(3,15)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	486.000.000,00	470.688.942,00	96,85	(15.311.058,00)	(3,15)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	300.000.000,00	282.610.000,00	94,20	(17.390.000,00)	(5,80)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	300.000.000,00	282.610.000,00	94,20	(17.390.000,00)	(5,80)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	192.000.000,00	181.799.000,00	94,69	(10.201.000,00)	(5,31)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	192.000.000,00	181.799.000,00	94,69	(10.201.000,00)	(5,31)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	162.000.000,00	147.440.000,00	91,01	(14.560.000,00)	(8,99)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	162.000.000,00	147.440.000,00	91,01	(14.560.000,00)	(8,99)
Belanja Tunjangan Beras ASN	282.000.000,00	270.343.860,00	95,87	(11.656.140,00)	(4,13)
Belanja Tunjangan Beras PNS	282.000.000,00	270.343.860,00	95,87	(11.656.140,00)	(4,13)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.000.000,00	32.805.763,00	65,61	(17.194.237,00)	(34,39)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.000.000,00	32.805.763,00	65,61	(17.194.237,00)	(34,39)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	145.000,00	73.770,00	50,88	(71.230,00)	(49,12)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	145.000,00	73.770,00	50,88	(71.230,00)	(49,12)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	568.000.000,00	538.324.320,00	94,78	(29.675.680,00)	(5,22)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	568.000.000,00	538.324.320,00	94,78	(29.675.680,00)	(5,22)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.000.000,00	9.923.843,00	82,70	(2.076.157,00)	(17,30)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.000.000,00	9.923.843,00	82,70	(2.076.157,00)	(17,30)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000,00	29.772.487,00	93,04	(2.227.513,00)	(6,96)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	32.000.000,00	29.772.487,00	93,04	(2.227.513,00)	(6,96)
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	34.000.000,00	0,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	34.000.000,00	0,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.564.644.000,00	14.661.877.353,00	94,20	(902.766.647,00)	(5,80)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	456.300.000,00	456.300.000,00	100,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	456.300.000,00	456.300.000,00	100,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	15.108.344.000,00	14.205.577.353,00	94,02	(902.766.647,00)	(5,98)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	15.108.344.000,00	14.205.577.353,00	94,02	(902.766.647,00)	(5,98)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	533.969.000,00	533.969.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	504.569.000,00	504.569.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	480.089.000,00	480.089.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	23.201.758.000,00	21.995.060.918,00	94,80	(1.206.697.082,00)	(5,20)

Perbandingan realisasi belanja Pegawai TA. 2022 sejumlah **Rp21.995.060.918,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp20.897.561.640,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	21.995.060.918,00	20.897.561.640,00
Jumlah Belanja Pegawai		21.995.060.918,00	20.897.561.640,00

Belanja Barang dan Jasa

APBD setelah Perubahan atas Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp41.322.919.000,00** terealisasi **Rp39.841.086.289,00** atau sebesar **96,41%** dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Barang dan Jasa	52.768.445.622,00	50.435.312.255,00	95,58	(2.333.133.367,00)	(4,42)
Belanja Barang	6.562.163.497,00	6.259.870.013,00	95,39	(302.293.484,00)	(4,61)
Belanja Barang Pakai Habis	6.562.163.497,00	6.259.870.013,00	95,39	(302.293.484,00)	(4,61)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.542.500,00	14.209.244,00	97,71	(333.256,00)	(2,29)
Belanja Bahan-Bahan Kimia	27.705.749,00	27.130.350,00	97,92	(575.399,00)	(2,08)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	226.080.486,00	226.011.883,00	99,97	(68.603,00)	(0,03)
Belanja Bahan-Bahan Baku	123.496.500,00	120.408.900,00	97,50	(3.087.600,00)	(2,50)
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.250.000,00	5.139.300,00	97,89	(110.700,00)	(2,11)
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	128.750,00	75.000,00	58,25	(53.750,00)	(41,75)
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	243.792.506,00	220.552.375,00	90,47	(23.240.131,00)	(9,53)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.090.000,00	1.200.000,00	38,83	(1.890.000,00)	(61,17)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.000.000,00	8.991.000,00	99,90	(9.000,00)	(0,10)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.545.000,00	1.545.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	377.368.620,00	359.793.157,00	95,34	(17.575.463,00)	(4,66)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	751.829.167,00	717.786.403,00	95,47	(34.042.764,00)	(4,53)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.391.812,00	331.862.127,00	92,08	(28.529.685,00)	(7,92)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44.660.000,00	44.560.000,00	99,78	(100.000,00)	(0,22)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	419.012.391,00	394.604.608,00	94,17	(24.407.783,00)	(5,83)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	112.501.261,00	109.227.543,00	97,09	(3.273.718,00)	(2,91)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	52.931.577,00	52.058.297,00	98,35	(873.280,00)	(1,65)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	143.057.660,00	142.456.733,00	99,58	(600.927,00)	(0,42)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	1.514.852.983,00	1.452.480.121,00	95,88	(62.372.862,00)	(4,12)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	145.591.140,00	143.212.282,00	98,37	(2.378.858,00)	(1,63)
Belanja Obat-Obatan-Obat	778.772,00	764.250,00	98,14	(14.522,00)	(1,86)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.597.146.623,00	1.505.455.200,00	94,26	(91.691.423,00)	(5,74)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.000.000,00	29.605.500,00	87,08	(4.394.500,00)	(12,93)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.000.000,00	29.986.500,00	99,96	(13.500,00)	(0,05)
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	19.250.000,00	17.844.582,00	92,70	(1.405.418,00)	(7,30)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.125.000,00	29.083.110,00	99,86	(41.890,00)	(0,14)
Belanja Pakaian KORPRI	186.850.000,00	185.841.000,00	99,46	(1.009.000,00)	(0,54)
Belanja Pakaian Batik Tradisional	88.185.000,00	87.985.548,00	99,77	(199.452,00)	(0,23)
Belanja Jasa	23.008.875.035,00	21.965.310.749,00	95,46	(1.043.564.286,00)	(4,54)
Belanja Jasa Kantor	20.708.119.015,00	19.767.513.317,00	95,46	(940.605.698,00)	(4,54)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	109.562.000,00	109.098.000,00	99,58	(464.000,00)	(0,42)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.858.512.000,00	2.590.420.000,00	90,62	(268.092.000,00)	(9,38)
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	75.742.000,00	75.529.462,00	99,72	(212.538,00)	(0,28)
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	50.400.000,00	49.500.000,00	98,21	(900.000,00)	(1,79)
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.192.800.000,00	6.127.872.672,00	98,95	(64.927.328,00)	(1,05)
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	63.100.000,00	53.499.526,00	84,79	(9.600.474,00)	(15,21)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	480.000.000,00	464.030.028,00	96,67	(15.969.972,00)	(3,33)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.364.100.000,00	2.283.646.756,00	96,60	(80.453.244,00)	(3,40)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.426.636.469,00	1.383.811.582,00	97,00	(42.824.887,00)	(3,00)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	492.077.807,00	433.182.544,00	88,03	(58.895.263,00)	(11,97)
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	35.000.000,00	33.767.822,00	96,48	(1.232.178,00)	(3,52)
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	99.748.920,00	66,50	(50.251.080,00)	(33,50)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.495.000.000,00	3.347.141.450,00	95,77	(147.858.550,00)	(4,23)
Belanja Jasa Kalibrasi	150.000.000,00	83.000.000,00	55,33	(67.000.000,00)	(44,67)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	20.842.415,00	18.500.000,00	88,76	(2.342.415,00)	(11,24)
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	25.000.000,00	24.992.538,00	99,97	(7.462,00)	(0,03)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.332.000.000,00	1.310.949.350,00	98,42	(21.050.650,00)	(1,58)
Belanja Tagihan Telepon	15.750.000,00	15.108.954,00	95,93	(641.046,00)	(4,07)
Belanja Tagihan Air	59.300.000,00	55.879.900,00	94,23	(3.420.100,00)	(5,77)
Belanja Tagihan Listrik	640.581.474,00	622.103.709,00	97,12	(18.477.765,00)	(2,88)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.899.600,00	16.980.000,00	85,33	(2.919.600,00)	(14,67)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	328.629.250,00	307.656.019,00	93,62	(20.973.231,00)	(6,38)
Belanja Paket/Pengiriman	136.534.000,00	87.878.285,00	64,36	(48.655.715,00)	(35,64)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	142.852.000,00	129.887.800,00	90,92	(12.964.200,00)	(9,08)
Belanja Medical Check Up	36.000.000,00	35.528.000,00	98,69	(472.000,00)	(1,31)
Belanja luran Jaminan/Asuransi	224.155.020,00	217.220.405,00	96,91	(6.934.615,00)	(3,09)
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	170.832.000,00	168.019.200,00	98,35	(2.812.800,00)	(1,65)
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.224.520,00	8.606.880,00	70,41	(3.617.640,00)	(29,59)
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.098.500,00	10.758.600,00	96,94	(339.900,00)	(3,06)
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	30.000.000,00	29.835.725,00	99,45	(164.275,00)	(0,55)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	103.396.000,00	91.990.052,00	88,97	(11.405.948,00)	(11,03)
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28.000.000,00	16.852.000,00	60,19	(11.148.000,00)	(39,81)
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	75.396.000,00	75.138.052,00	99,66	(257.948,00)	(0,34)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	173.650.000,00	158.238.010,00	91,12	(15.411.990,00)	(8,88)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	159.650.000,00	144.274.010,00	90,37	(15.375.990,00)	(9,63)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	13.964.000,00	99,74	(36.000,00)	(0,26)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	60.255.000,00	59.739.000,00	99,14	(516.000,00)	(0,86)
Belanja Sewa Tanaman	60.255.000,00	59.739.000,00	99,14	(516.000,00)	(0,86)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.800.000,00	66.932.208,00	88,30	(8.867.792,00)	(11,70)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	55.800.000,00	47.085.408,00	84,38	(8.714.592,00)	(15,62)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.000.000,00	19.846.800,00	99,23	(153.200,00)	(0,77)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.639.000.000,00	1.582.477.757,00	96,55	(56.522.243,00)	(3,45)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000,00	199.275.000,00	99,64	(725.000,00)	(0,36)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	94.312.260,00	94,31	(5.687.740,00)	(5,69)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	1.339.000.000,00	1.288.890.497,00	96,26	(50.109.503,00)	(3,74)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.500.000,00	21.200.000,00	86,53	(3.300.000,00)	(13,47)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.500.000,00	21.200.000,00	86,53	(3.300.000,00)	(13,47)
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	2.104.300.100,00	2.066.228.704,00	98,19	(38.071.396,00)	(1,81)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	477.420.000,00	469.806.522,00	98,41	(7.613.478,00)	(1,59)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	183.000.000,00	181.173.342,00	99,00	(1.826.658,00)	(1,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.000.000,00	32.997.890,00	99,99	(2.110,00)	(0,01)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	20.200.000,00	19.189.000,00	95,00	(1.011.000,00)	(5,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	52.770.000,00	52.195.000,00	98,91	(575.000,00)	(1,09)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	29.801.835,00	99,34	(198.165,00)	(0,66)
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.575.000,00	2.569.650,00	99,79	(5.350,00)	(0,21)
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	37.500.000,00	36.549.525,00	97,47	(950.475,00)	(2,53)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	111.375.000,00	108.330.280,00	97,27	(3.044.720,00)	(2,73)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.549.630.100,00	1.519.181.416,00	98,04	(30.448.684,00)	(1,96)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.549.630.100,00	1.519.181.416,00	98,04	(30.448.684,00)	(1,96)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.250.000,00	77.240.766,00	99,99	(9.234,00)	(0,01)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	77.250.000,00	77.240.766,00	99,99	(9.234,00)	(0,01)
Belanja Perjalanan Dinas	20.955.106.990,00	20.006.004.039,00	95,47	(949.102.951,00)	(4,53)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.349.646.990,00	19.506.382.394,00	95,86	(843.264.596,00)	(4,14)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.923.092.000,00	10.496.322.126,00	96,09	(426.769.874,00)	(3,91)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	989.350.000,00	915.556.575,00	92,54	(73.793.425,00)	(7,46)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.813.102.000,00	1.745.478.500,00	96,27	(67.623.500,00)	(3,73)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.624.102.990,00	6.349.025.193,00	95,85	(275.077.797,00)	(4,15)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	605.460.000,00	499.621.645,00	82,52	(105.838.355,00)	(17,48)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	605.460.000,00	499.621.645,00	82,52	(105.838.355,00)	(17,48)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	138.000.000,00	137.898.750,00	99,93	(101.250,00)	(0,07)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	138.000.000,00	137.898.750,00	99,93	(101.250,00)	(0,07)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	138.000.000,00	137.898.750,00	99,93	(101.250,00)	(0,07)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	52.768.445.622,00	50.435.312.255,00	95,58	(2.333.133.367,00)	(4,42)

Perbandingan realisasi belanja barang dan jasa TA. 2022 sejumlah **Rp50.435.312.255,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp39.841.086.289,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Barang dan Jasa	50.435.312.255,00	39.841.086.289,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		50.435.312.255,00	39.841.086.289,00

Belanja Subsidi

APBD setelah Perubahan atas Belanja Subsidi TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp7.000.000.000,00** terealisasi **Rp98.749.370,00** atau sebesar **1,41%**.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Subsidi kepada BUMD	7.000.000.000,00	98.749.370,00	1,41	6.901.250.630,00	(98,59)
Jumlah Belanja Subsidi	7.000.000.000,00	98.749.370,00	1,41	6.901.250.630,00	(98,59)

Perbandingan realisasi belanja Subsidi TA. 2022 sejumlah **Rp98.749.370,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp0,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Subsidi	98.749.370,00	0,00
Jumlah Belanja Subsidi		98.749.370,00	0,00

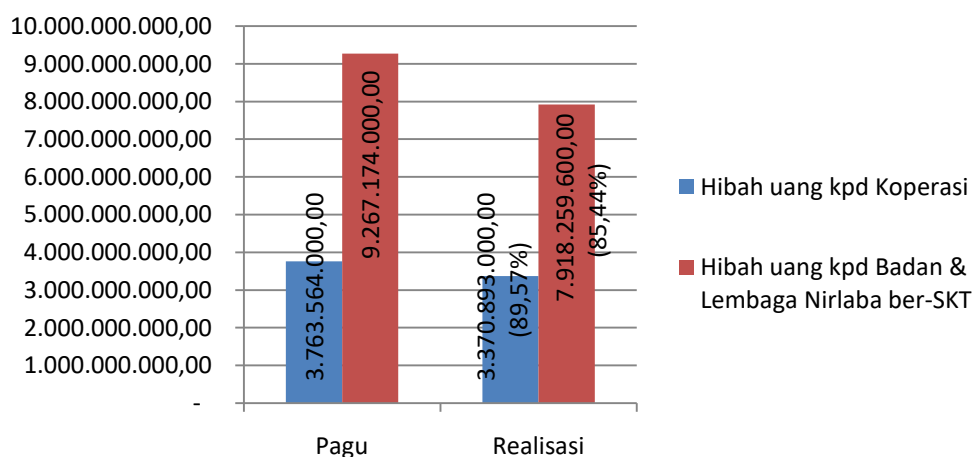
Belanja Hibah

APBD setelah Perubahan atas Belanja Hibah TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp13.030.738.000,00** terealisasi **Rp11.289.152.600,00** atau sebesar **86,63%**.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut :

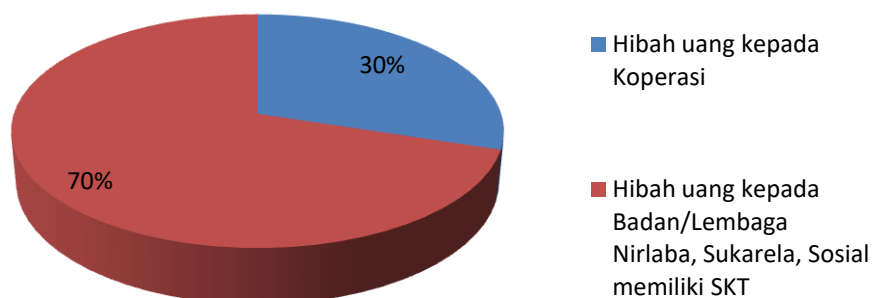
Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Hibah	13.030.738.000	11.289.152.600	86,63	(1.741.585.400)	(13,37)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.030.738.000	11.289.152.600	86,63	(1.741.585.400)	(13,37)
Belanja Hibah kepada Koperasi	3.763.564.000	3.370.893.000	89,57	(392.671.000)	(10,43)
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	3.763.564.000	3.370.893.000	89,57	(392.671.000)	(10,43)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.267.174.000	7.918.259.600	85,44	(1.348.914.400)	(14,56)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.267.174.000	7.918.259.600	85,44	(1.348.914.400)	(14,56)
Jumlah Belanja Hibah	13.030.738.000	11.289.152.600	86,63	(1.741.585.400)	(13,37)

Realisasi Belanja Hibah



Gambar 2.5 Realisasi Belanja Hibah

Komposisi Realisasi Belanja Hibah



Gambar 2.6 Komposisi Realisasi Belanja Hibah

Perbandingan realisasi belanja Hibah TA. 2022 sejumlah **Rp11.289.152.600,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp10.828.437.700,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.289.152.600,00	10.828.437.700,00
Jumlah Belanja Hibah		11.289.152.600,00	10.828.437.700,00

Belanja Bantuan Sosial

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Sosial TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp17.998.800.000,00** terealisasi **Rp13.761.000.000,00** atau sebesar **76,46%**.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Bantuan Sosial	17.998.800.000,00	13.761.000.000,00	76,46	(4.237.800.000,00)	(23,54)
Belanja Bantuan Sosial kepada individu	17.998.800.000,00	13.761.000.000,00	76,46	(4.237.800.000,00)	(23,54)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	17.998.800.000,00	13.761.000.000,00	76,46	(4.237.800.000,00)	(23,54)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	17.998.800.000,00	13.761.000.000,00	76,46	(4.237.800.000,00)	(23,54)

Perbandingan realisasi belanja Bantuan Sosial TA. 2022 sejumlah **Rp13.761.000.000,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp0,00** sebagai berikut :

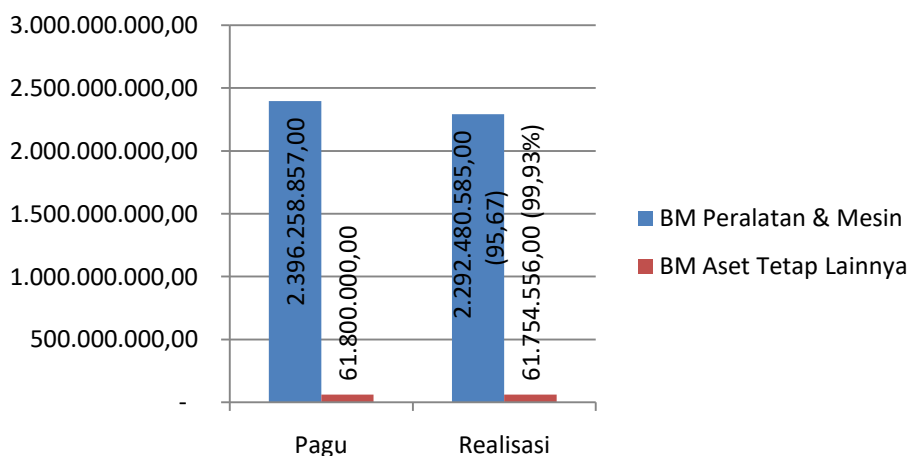
No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Bantuan Sosial kepada individu	13.761.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		13.761.000.000,00	0,00

Belanja Modal

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp2.458.058.857,00** terealisasi **Rp2.354.235.141,00** atau sebesar **95,78%** dari anggaran 2022. Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut :

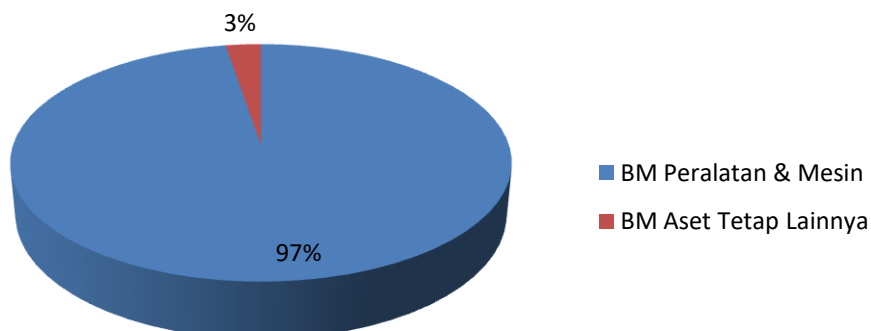
Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
BELANJA MODAL	2.458.058.857	2.354.235.141	95,78	(103.823.716)	(4,22)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.396.258.857	2.292.480.585	95,67	(103.778.272)	(4,33)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.800.000	61.754.556	99,93	(45.444)	(0,07)
Jumlah Belanja Modal	2.458.058.857	2.354.235.141	95,78	(103.823.716)	(4,22)

Realisasi Belanja Modal



Gambar 2.7 Realisasi Belanja Modal

Komposisi Realisasi Belanja Modal



Gambar 2.8 Komposisi Realisasi Belanja Modal

Perbandingan realisasi belanja Modal TA. 2022 sejumlah **Rp2.354.235.141,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp2.269.429.260,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.292.480.585,00	2.001.833.610,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	32.642.500,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.754.556,00	234.953.150,00
Jumlah Belanja Modal		2.354.235.141,00	2.269.429.260,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp2.396.258.857,00** terealisasi **Rp2.292.480.585,00** atau sebesar **95,67%** dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Modal Modal Peralatan dan Mesin
sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.396.258.857,00	2.292.480.585,00	95,67	(103.778.272,00)	(4,33)
Belanja Modal Alat Besar	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	(10.000,00)	(0,10)
Belanja Modal Alat Bantu	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	(10.000,00)	(0,10)
Belanja Modal Pompa	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	(10.000,00)	(0,10)
Belanja Modal Alat Angkutan	287.099.600,00	278.898.232,00	97,14	(8.201.368,00)	(2,86)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	262.650.000,00	255.798.632,00	97,39	(6.851.368,00)	(2,61)
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	262.650.000,00	255.798.632,00	97,39	(6.851.368,00)	(2,61)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	24.449.600,00	23.099.600,00	94,48	(1.350.000,00)	(5,52)
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.449.600,00	4.344.600,00	97,64	(105.000,00)	(2,36)
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	20.000.000,00	18.755.000,00	93,78	(1.245.000,00)	(6,23)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.236.000,00	1.212.000,00	98,06	(24.000,00)	(1,94)
Belanja Modal Alat Ukur	1.236.000,00	1.212.000,00	98,06	(24.000,00)	(1,94)
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.236.000,00	1.212.000,00	98,06	(24.000,00)	(1,94)
Belanja Modal Alat Pertanian	2.518.819,00	2.497.500,00	99,15	(21.319,00)	(0,85)
Belanja Modal Alat Pengolahan	2.518.819,00	2.497.500,00	99,15	(21.319,00)	(0,85)
Belanja Modal Alat Processing	2.518.819,00	2.497.500,00	99,15	(21.319,00)	(0,85)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	702.628.690,00	660.970.600,00	94,07	(41.658.090,00)	(5,93)
Belanja Modal Alat Kantor	203.999.793,00	200.957.500,00	98,51	(3.042.293,00)	(1,49)
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	48.584.793,00	48.540.000,00	99,91	(44.793,00)	(0,09)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	155.415.000,00	152.417.500,00	98,07	(2.997.500,00)	(1,93)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	384.075.717,00	357.077.250,00	92,97	(26.998.467,00)	(7,03)
Belanja Modal Mebel	318.586.924,00	292.647.700,00	91,86	(25.939.224,00)	(8,14)
Belanja Modal Alat Pendingin	41.884.144,00	41.652.750,00	99,45	(231.394,00)	(0,55)
Belanja Modal Alat Dapur	1.854.000,00	1.742.700,00	94,00	(111.300,00)	(6,00)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.750.649,00	21.034.100,00	96,71	(716.549,00)	(3,29)

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	114.553.180,00	102.935.850,00	89,86	(11.617.330,00)	(10,14)
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	114.553.180,00	102.935.850,00	89,86	(11.617.330,00)	(10,14)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	202.634.600,00	193.941.200,00	95,71	(8.693.400,00)	(4,29)
Belanja Modal Alat Studio	194.909.600,00	186.282.200,00	95,57	(8.627.400,00)	(4,43)
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	48.537.000,00	45.667.000,00	94,09	(2.870.000,00)	(5,91)
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	146.372.600,00	140.615.200,00	96,07	(5.757.400,00)	(3,93)
Belanja Modal Alat Komunikasi	7.725.000,00	7.659.000,00	99,15	(66.000,00)	(0,85)
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.725.000,00	7.659.000,00	99,15	(66.000,00)	(0,85)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	1.190.141.148,00	1.144.971.053,00	96,20	(45.170.095,00)	(3,80)
Belanja Modal Komputer Unit	884.753.326,00	857.613.553,00	96,93	(27.139.773,00)	(3,07)
Belanja Modal Personal Computer	884.753.326,00	857.613.553,00	96,93	(27.139.773,00)	(3,07)
Belanja Modal Peralatan Komputer	305.387.822,00	287.357.500,00	94,10	(18.030.322,00)	(5,90)
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	268.254.811,00	250.430.750,00	93,36	(17.824.061,00)	(6,64)
Belanja Modal Peralatan Jaringan	21.889.011,00	21.682.750,00	99,06	(206.261,00)	(0,94)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.244.000,00	15.244.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.396.258.857,00	2.292.480.585,00	95,67	(103.778.272,00)	(4,33)

Perbandingan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 sejumlah **Rp2.292.480.585,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp2.001.833.610,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.292.480.585,00	2.001.833.610,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.292.480.585,00	2.001.833.610,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp0,00** terealisasi **Rp0,00** atau sebesar **0,00%** dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perbandingan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022 sejumlah **Rp0,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp32.642.500,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	32.642.500,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	32.642.500,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp61.800.000,00** terealisasi **Rp61.754.556,00** atau sebesar **99,93%** dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Modal Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=(3-2)	6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.800.000,00	61.754.556,00	99,93	(45.444,00)	(0,07)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	30.900.000,00	30.896.556,00	99,99	(3.444,00)	(0,01)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	30.900.000,00	30.896.556,00	99,99	(3.444,00)	(0,01)
Belanja Modal Buku Umum	30.900.000,00	30.896.556,00	99,99	(3.444,00)	(0,01)
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.900.000,00	30.858.000,00	99,86	(42.000,00)	(0,14)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.900.000,00	30.858.000,00	99,86	(42.000,00)	(0,14)
Belanja Modal Software	30.900.000,00	30.858.000,00	99,86	(42.000,00)	(0,14)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.800.000,00	61.754.556,00	99,93	(45.444,00)	(0,07)

Perbandingan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022 sejumlah **Rp61.754.556,00** dan TA. 2021 sebesar **Rp234.953.150,00** sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	2	3	4
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.754.556,00	234.953.150,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		61.754.556,00	234.953.150,00

(3) Transfer

Transfer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar *Rp0,00 (nihil)* karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

(4) Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (***Rp16.578.812.382,25***)

(5) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar *Rp0,00 (nihil)* karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

(6) SILPA

Sedangkan Silpa tahun 2022 sebesar ***Rp16.578.812.382,25*** atau sebesar ***4,49 %*** dari anggaran dan terdapat pada Kas Bendahara Pengeluaran sebesar ***Rp461.613.450,00*** dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 (Bukti terlampir) sebesar ***Rp461.613.450,00***

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Transfer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur **Rp0,00 (nihil)** karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

c) Neraca**(1) Aset****ASET LANCAR****Kas di Kas di Bendahara**

Pada akhir Desember 2022 tidak terdapat sisa Kas pada Bendahara Penerimaan sedangkan di Bendahara Pengeluaran terdapat sisa Kas sebesar **Rp461.613.450,00** dan sisa kas telah disetor ke Kas Daerah sebesar **Rp461.613.450,00** oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 30 Desember 2022 (Bukti terlampir).

Kas Bendahara Pengeluaran

Kas pada Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** sebagaimana terinci :

- a. Nilai Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Sisa Kas Ganti Uang (GU) per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar dan **Rp0,00** dan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Sekretariat	0,00	0,00
- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	0,00	0,00
- Bidang Produksi dan RestrukturisasiUsaha	0,00	0,00
- Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
- Bidang Pemasaran	0,00	0,00
- UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0,00	0,00
Jumlah seluruhnya	0,00	0,00

- b. Jumlah uang Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Pajak yang belum disetorkan pada pihak ketiga 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Sekretariat	0,00	0,00
- Bidang Kelembagaan	0,00	0,00
- Bidang Usaha Koperasi	0,00	0,00
- Bidang FPUSP	0,00	0,00
- Bidang UMKM	0,00	0,00
- UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0,00	0,00
Jumlah seluruhnya	0,00	0,00

Kas Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** atau, dengan rincian berikut :

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Kas di Bend. Penerimaan SKPD		
- Kas di Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jml saldo Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00

Beban dibayar dimuka

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Beban dibayar dimuka	23.786.838,29	23.269.284,82

Jumlah Beban dibayar dimuka per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp23.786.838,29** dan sebesar **Rp23.269.284,82** yang rinciannya sebagai berikut :

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Asuransi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Asuransi Kendaraan Dinas	23.786.838,00	23.269.284,82

Persediaan

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Persediaan	303.557.972,48	380.924.245,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dalam keadaan baik.

ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp125.530.072.547,67** dan **Rp126.187.562.307,67** merupakan nilai aset tetap berdasarkan perhitungan aset yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*Acquisition Cost*) dan memperhitungkan Depresiasi (penyusutan)

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Aset Tetap	125.530.072.547,67	126.187.562.307,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.) :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Tanah	82.094.000.000,00	82.094.000.000,00
Peralatan dan Mesin	23.885.724.787,00	21.384.679.502,00
Gedung dan Bangunan	44.358.747.797,67	44.332.449.818,67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.409.300,00	535.409.300,00
Aset Tetap lainnya	99.409.300,00	87.098.810,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi penyusutan assettetap	(25.443.272.583,00)	(22.246.075.123,00)
Jumlah	125.530.072.547,67	126.187.562.307,67

Jumlah tersebut merupakan penggabungan/akumulasi Aset Tetap per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur data lengkap terlampir.

Tanah

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Tanah	82.094.000.000,00	82.094.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021.

Aset Aktiva tetap tanah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adanya penambahan pada tahun 2022 sehingga rincian per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

- Tanah seluas 10.270 m2 dengan nilai Rp10.270.000.000,00 terletak di Jl. Juanda Sidoarjo dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat No.29 tanggal 17 September 2003.
- Tanah seluas 257 m2 dengan nilai Rp124.000.000,00 terletak Bandilan – Surabaya dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat No. 18 tanggal 11 Juni 2003.
- Tanah seluas 25.000 m2 dengan nilai Rp71.700.000.000,00 terletak di Jl. Ki Ageng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang yang merupakan penggantian tanah dan bangunan UPT Pelatihan KUMKM yang terkena proyek jalan tol dan telah dilakukan serah terima dari Kementerian PUPR dan PT. Jasa Marga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana BAST No. 020/11065/203.5/2020 tanggal 08-12- 2020.

Peralatan dan Mesin

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Peralatan dan Mesin	23.885.724.787,00	21.384.679.502,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 Rincian Peralatan dan Mesin berikut. :

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1.	Alat-alat Besar	801.816.630,00	791.826.630,00
2.	Alat-alat Angkutan	5.066.320.212,00	4.787.421.980,00
3.	Alat-alat Bengkel dan ukur	16.180.400,00	14.968.400,00
4.	Alat-alat Kantor dan RT	8.070.741.085,00	7.401.657.185,00

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
5.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	2.261.046.063,00	2.068.003.963,00
6.	Alat-alat Kedokteran	26.900.000,00	26.900.000,00
7.	Alat Laboratorium	92.510.000,00	92.510.000,00
8.	Alat Komputer	7.306.648.397,00	6.171.977.344,00
9.	Alat Olah Raga	29.414.000,00	29.414.000,00
	Jumlah	23.885.724.787,00	21.384.679.502,00

Perubahan nilai Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan terdapat penambahan sebesar **Rp2.569.606.085,00** dan pengurangan sebesar **Rp68.560.800,00** dengan rincian sebagai berikut:

1) Penambahan sebesar **Rp2.569.606.085,00** berasal dari :

- Alat-alat Besar Rp 9.990.000,00
- Alat-alat angkutan Rp 278.898.232,00
- Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 1.212.000,00
- Alat Kantor & Rumah Tangga Rp 722.443.100,00
- Alat Studio & Komunikasi Rp 193.941.200,00
- Alat Komputer Rp1.148.973.553,00

2) Pengurangan sebesar **Rp68.560.800,00** berasal dari :

- Alat Kantor & Rumah Tangga Rp 53.359.200,00
- Alat Studio & Komunikasi Rp 899.100,00
- Alat Komputer Rp 14.302.500,00

3) Pada Awal Tahun 2022 Peralatan dan Mesin sebesar **Rp21.384.679.502,00** dengan adanya penambahan sebesar **Rp2.569.606.085,00** dan pengurangan sebesar **Rp68.560.800,00** sehingga untuk Peralatan dan Mesin menjadi **Rp23.855.724.787,00**

Gedung dan Bangunan

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Gedung dan bangunan	44.358.747.797,67	44.332.449.818,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan yang ada pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021.

Rincian Gedung dan Bangunan berikut:

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	44.215.290.197,67	43.974.844.218,67
2.	Bangunan Monumen	110.815.100,00	110.815.000,00
3	Tugu Titik Kontrol	32.642.500,00	246.790.500,00
	Jumlah	44.358.747.797,67	44.332.449.818,67

Perubahan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan terdapat penambahan sebesar **Rp240.445.979,00** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan sebesar **Rp240.445.979,00** berasal dari :
 - Bangunan Gedung Rp240.445.979,00
- 2) Pengurangan sebesar **Rp214.148.000,00** berasal dari :
 - Tugu Titik Kontrol Rp214.148.000,00
- 3) Pada Awal Tahun 2022 Gedung dan Bangunan sebesar **Rp44.332.449.818,67,00** dengan adanya penambahan sebesar **Rp240.445.979,00** dan pengurangan sebesar **Rp214.148.000,00** sehingga untuk Gedung dan Bangunan menjadi **Rp44.358.747.797,67**

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Jalan, irigasi dan Jaringan	535.409.300,00	535.409.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan berikut :

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1.	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
2.	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
3.	Instalasi	535.409.300,00	535.409.300,00
4.	Jaringan	0,00	0,00
	Jumlah	535.409.300,00	535.409.300,00

Nilai Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun 2022 tidak ada perubahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal APBD Tahun 2022 untuk Instalasi tidak terdapat penambahan/pengurangan sehingga saldo per akhir Desember 2022 tetap sebesar Rp535.409.300,00
- b. Sehingga untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per akhir Desember 2022 sebesar Rp535.409.300,00

Aset Tetap Lainnya

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Aset Tetap lainnya	99.463.246,00	87.098.810,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Rincian Aset Tetap Lainnya berikut:

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1.	Buku dan Perpustakaan	80.213.246,00	67.848.810,00
2.	Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	19.250.000,00	19.250.000,00
3.	Hewan /Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00
	Jumlah	99.463.246,00	87.098.810,00

Perubahan nilai Aktiva Tetap Aset Tetap Lainnya disebabkan terdapat penambahan sebesar **Rp271.342.535,00** dan pengurangan sebesar **Rp258.978.099,00** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan sebesar **Rp271.342.535,00** berasal dari :
 - Buku & Perpustakaan **Rp271.342.535,00**
- 2) Penambahan sebesar **Rp258.978.099,00** berasal dari :
 - Buku & Perpustakaan **Rp258.978.099,00**
- 3) Pada Awal Tahun 2022 Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp87.098.810,00** dengan adanya penambahan sebesar **Rp271.342.535,00** dan pengurangan sebesar **Rp258.978.099,00** sehingga untuk Aset Tetap Lainnya menjadi **Rp99.463.246,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Untuk Tahun 2022 tidak terdapat aset konstruksi dalam pengerjaan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa / nilai residu.

Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013.

Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar **(Rp27.366.716.241,00)** terdiri dari :

- a. Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar **(Rp25.443.272.583,00)**
- b. Akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar **(Rp1.923.443.658,00)**

Nilai bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku atas Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanah	82.094.000.000,00
Peralatan dan Mesin	23.885.724.787,00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.402.068.295,00)
Gedung dan Bangunan	44.358.747.797,67
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.900.699.199,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.409.300,00
Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(121.255.089,00)
Aset Tetap Lainnya	99.463.246,00
Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19.250.000,00)
Nilai Buku Aset	150.973.345.130,67
Aset Tetap Lainnya (Hewan Ternak dan Tumbuhan)	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
Total Aset Tetap	125.530.072.547,67
Aset Lainnya - Aset Tetap Non Operasional	3.709.198.985,00
Akum. Penyusutan Aset Lainnya -	
Aset Tetap Non Operasional	(1.923.443.658,00)
Total Aset Lainnya	1.785.755.327,00
Total Aset	127.643.172.685,44

Perbandingan rincian Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4
Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.402.206.712,00	15.945.861.583,00	
Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.900.699.199,00	6.173.839.567,00	
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.255.089,00	107.123.973,00	
Penyusutan aset tetap lainnya	19.250.000,00	19.250.000,00	
Jumlah Penyusutan	25.443.272.583,00	22.246.075.123,00	

ASET LAINNYA

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Aset Lainnya	1.785.755.327,00	1.991.641.351,00

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1	Aset Tidak Berwujud	2.579.736.585,00	2.548.878.585,00
2	Aset Lain-lain	1.129.462.400,00	1.129.462.400,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.510.428.959,00)	(1.273.684.935,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(413.014.669,00)	(413.014.699,00)
Jumlah		1.785.755.327,00	1.991.641.351,00

1. Perubahan nilai Aktiva Tetap pada Aset Lainnya diakibatkan oleh Penambahan sebesar **Rp30.858.000,00** berasal dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal APBD Tahun 2022 berupa aset tak berwujud sebesar **Rp30.858.000,00** yaitu merupakan pengadaan modal software
 - b. Aktiva Tetap Aset Lainnya tidak terdapat mutasi bertambah/berkurang
2. Aset Lain-Lain pada tahun 2022 sebesar **Rp1.129.462.400,00**

(2) Kewajiban**KEWAJIBAN****Kewajiban Jangka Pendek****Utang PFK**

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Utang PFK	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang PFK yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Utang PFK tersebut merupakan pemotongan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran yang pada akhir tahun belum disetor diKas Daerah.

Pemotongan dilakukan Bendahara Pengeluaran :

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1	Sekretariat	0,00	0,00
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	0,00	0,00
3	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00
4	Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
5	Bidang Pemasaran	0,00	0,00
6	UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0,00	0,00
Jumlah seluruhnya		0,00	0,00

Utang Belanja

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Utang Belanja	69.437.883,00	58.494.247,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Utang Belanja sebesar **Rp69.437.883,00** yang berasal dari utang pembayaran utilitas tagihan air PDAM **Rp6.786.800,00** ; listrik PLN **Rp61.481.962,00** ; telepon **Rp729.027,00** : internet **Rp807.250,00** serta Gaji dan Tunjangan **Rp632.844,00** Rincian utang belanja pada SKPD :

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1	Sekretariat	52.098.436,00	45.318.111,00
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	0,00	0,00
3	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00
4	Bidang Pembiayaan	0,00	0,00
5	Bidang Pemasaran	0,00	0,00
6	UPT Pelatihan Koperasidan UKM	17.339.447,00	13.176.136,00
Jumlah seluruhnya		69.437.883,00	58.494.247,00

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang Lainnya

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

(3) Ekuitas**EKUITAS DANA**

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Ekuitas Dana	227.963.891.038,24	203.190.419.937,73

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021.

Ekuitas

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Ekuitas	127.573.734.802,44	128.524.902.941,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Surplus/Defisit-LO

Uraian	31 Desember 2021	30 Desember 2020
1	2	3
Surplus/Defisit-LO	(100.390.156.235,80)	(74.665.516.996,24)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 yang ada di Neraca sebesar **(Rp100.390.156.235,80)** yang merupakan saldo Surplus/Defisit-LO kumulatif dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas SAL

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Ekuitas SAL	0,00	0,00

Tidak terdapat Ekuitas SAL per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	99.438.988.096,75	73.528.643.644,02

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 30 Desember 2022 yang merupakan Saldo di Neraca sebesar **Rp99.438.988.096,75** yang merupakan Ekuitas untuk dikonsolidasikan kumulatif dengan tahun sebelumnya.

4) Laporan Operasional**Pendapatan**

Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar **Rp494.522.187,25** sedangkan untuk 31 Desember tahun 2021 sebesar **Rp305.871.244,98** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4
Pendapatan Daerah	494.522.187,25	305.871.244,98	61,68
Pendapatan Asli Daerah	494.522.187,25	305.871.244,98	61,68
Retribusi Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli yg Sah	490.522.187,25	305.871.244,98	61,37
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	494.522.187,25	305.871.244,98	61,68

Beban Operasional

Beban Pegawai

Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar **Rp21.991.778.553,00** sedangkan untuk 31 Desember tahun 2021 sebesar **Rp20.901.476.849,00** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp1.090.301.704,00**

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar **Rp50.310.056.416,05** sedangkan untuk 31 Desember 2021 sebesar **Rp39.858.113.643,22** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp10.451.942.772,83** disebabkan adanya kenaikan pagu anggaran

Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar **Rp98.749.370,00** sedangkan untuk 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp98.749.370,00** disebabkan tahun anggaran 2021 tidak terdapat anggaran Belanja Subsidi.

Beban Hibah

Beban Hibah untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar **Rp11.289.152.600,00** sedangkan untuk 31 Desember 2021 sebesar **Rp10.828.437.700,00** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp460.714.900,00** disebabkan adanya kenaikan pagu anggaran.

Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar **Rp13.761.000.000,00** sedangkan untuk 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp13.761.000.000,00** disebabkan adanya kenaikan pagu anggaran.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp3.385.360.049,00** dan **Rp3.052.666.528,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.433.941.484,00	3.385.360.049,00	1,44
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.268.290.063,00	2.156.701.278,00	5,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	914.776.281,00	877.570.700,00	4,24
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.131.116,00	14.131.116,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	236.744.024,00	336.956.955,00	-29,74
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.433.941.484,00	3.385.360.049,00	1,44

Beban Tidak Terduga

Beban Lain-lain untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**

5) Laporan Arus Kas

Transfer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar **Rp0,00 (nihil)** karena tidak termasuk perangkat daerah SKPKD/BLUD

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 3 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp128.524.902.941,49** dan **Rp34.721.665.716,04**

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **(Rp100.390.156.235)** dan **(Rp74.665.516.996,24)**

Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Transaksi antar ekuitas untuk dikonsolidasikan TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp99.438.988.096,75** dan **Rp73.528.643.644,02**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas

Terdapat perubahan kebijakan/penyesuaian Ekuitas pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp94.940.110.577,67**

Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp127.573.734.802,44** dan **Rp128.524.902.941,62**

2. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

F. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Penggantian Manajemen Pemerintahan selama tahun berjalan
2. Kesalahan Manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
3. Komitmen atau Kontijesi yang tidak dapat disajikan oleh Neraca
4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan
5. Kejadian yang mempunyai dampak social yang harus ditanggulangi/ diselesaikan oleh pemerintah ; dan/atau
6. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkap.

G. PENUTUP.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan hasil Rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dari segi Keuangan dan Aset dan Laporan Keuangan secara lengkap telah kami jilid dalam buku.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini kami buat kiranya dapat memberikan informasi terhadap Laporan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Sidoarjo, 31 Desember 2022



Dr. ANDROMEDA QOMARIAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680117 199403 2 003